



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

**Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah**

**Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang
Tel: (0717) 439335, Fax: (0717) 439336

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta penjelasan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Pangkalpinang, 10 Januari 2022

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



H. FERY INSANI
NIP. 19700620 199903 1 009

IHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan.

LKj Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKj dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 4 sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, menunjukan bahwa capaian pada 4 sasaran strategis masuk pada kategori sangat tinggi. Semua sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 pencapaiannya di atas 100%. Realisasi capaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	%	100	100	100	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	%	95	100	105,26	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	%	85	92,59	108,9	Sangat Baik
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	%	85	90,99	107,05	Sangat Baik

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya implementasi dari integrasi perencanaan dan penganggaran dan belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya untuk mengoptimalkan implementasi integrasi perencanaan dan penganggaran agar dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat dimasa pandemi Covid 19 sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari suatu kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adanya tuntutan dari publik saat ini yang mendorong Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*), melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2017–2022. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan.

Pada tahun 2021, Bappeda melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah guna menghasilkan rancangan kebijakan dalam tugas-tugas perencanaan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat daerah maupun lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Bappeda menyampaikan laporan kinerja yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Pertanggungjawaban kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan sarana bagi Bappeda untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bappeda sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

I.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 berpedoman pada:

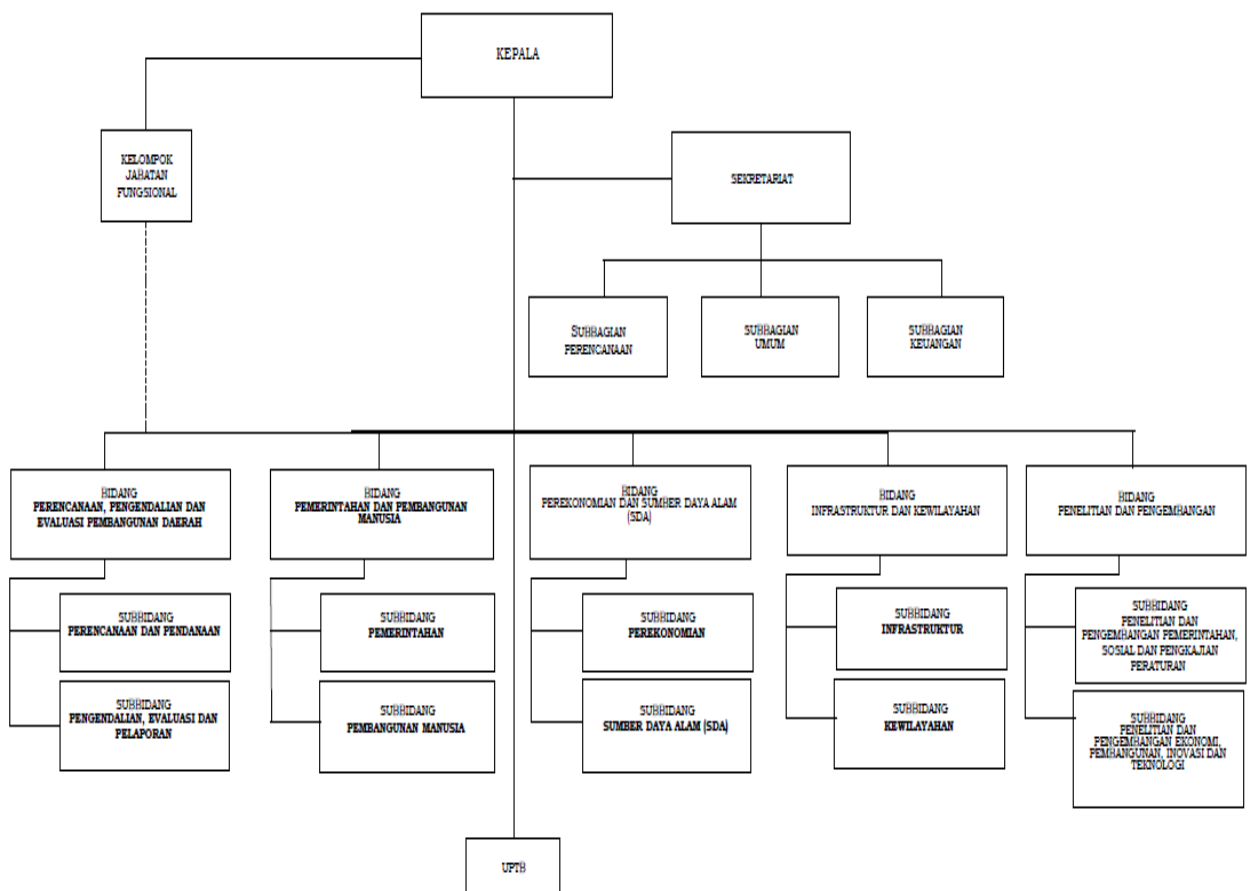
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran;
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

1.3 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Secara garis besar Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

BAGAN I.
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

I.4 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.5 Sumber Daya Manusia

Pegawai Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 74 orang. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I
Komposisi Pegawai Bappeda Tahun 2021

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	15	0	15
		Gol. III	50	1	51
		Gol. II	6	0	6
		Gol. I	0	0	0
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	3	0	3
		S2	27	0	27
		S1	34	0	34
		D. IV	0	1	1
		D. III	2	0	2
		D. I	0	0	0
		SMA/ sederajat	4	0	4
		SMP/ sederajat	0	0	0

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		SD/ sederajat	0	0	0
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	0	1
		Eselon III	6	0	6
		Eselon IV	13	0	13
		Fungsional:			
		Tertentu	25	2	27
		Umum	21	1	22
JUMLAH TOTAL			74	74	74

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki secara umum kekuatan aparatur Bappeda cukup memadai.

1.6 Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, sampai saat ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki *Personal Computer* dan Laptop. Dimasa Pandemi Covid 19 dibutuhkan sarana untuk melakukan rapat daring seperti *webcamera*, *infocus* dan jaringan *internet* yang *sustainable*. Kebutuhan akan listrik, telepon, dan faximili telah terpenuhi. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah juga telah memiliki server yang memuat database website Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk juga beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Tabel 2 berikut menampilkan asset Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2
Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

(No	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6

(No)	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	A		ASET TETAP		Rp20.632.780.349,23
1	01	01	TANAH	1	Rp35.247.769,00
2	02		PERALATAN DAN MESIN	1434	Rp6.748.945.917,00
		02	Alat-alat Besar	0	Rp402.333.000,00
		03	Alat-alat Angkutan	15	Rp1.085.030.000,00
		04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Rp16.600.000,00
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	0
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1692	Rp2.914.682.439,00
		07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	83	Rp443.851.494,00
		08	Alat-alat Kedokteran	0	0
		09	Alat-alat Laboratorium	0	0
		10	Alat-alat Keamanan	0	0
		11	Komputer	246	Rp. 1.787.508.984,00
		12	Rambu-Rambu	4	Rp98.940.000,00
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	13	Rp. 6.322.505.343,00
		11	Bangunan Gedung	13	Rp. 6.322.505.343.23,00
		12	Bangunan Monumen	0	0
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	11	Rp4.213.339.900,00
		13	Jalan dan Jembatan	2	Rp33.330.000,00
		14	Bangunan Air / Irigasi	2	0
		15	Instalasi	1	Rp56.750.000,00
		16	Jaringan	8	Rp. 4.123.259.900,00
5	05		ASET TETAP LAINNYA	25	Rp. 3.312.741.420,00
		17	Buku Perpustakaan	21	Rp. 3.299.881.420,00
		18	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	4	Rp. 12.860.000,00
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0
			Lain-lain	0	0
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	
7	B		ASET LAINNYA		641.410.040,00

(No)	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	01		Aset Tak Berwujud	0	-
	02		Aset Lain-lain	0	641.410.040,00

Sumber : Buku Inventaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

1.7 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2021, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi dana sebesar Rp17.502.590.800,00 yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi pelaksanaan 4 (empat) Program sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

Tabel 3
Pagu Anggaran Tahun 2021
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN BELANJA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp14.640.951.269,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.639.700.427,00
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp827.424.853,00
4.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp398.514251,00
JUMLAH		Rp 17.502.590.800,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Dana atau anggaran belanja yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sebagian besar berasal dari APBD Daerah juga didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBN. Rincian anggaran yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Belanja Bappeda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

SUMBER DANA	BESAR ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
-------------	---------------------	------------

APBD	Rp17.502.590.800,00	97,06%
APBN	Rp529.865.000,00	2,94%
TOTAL	Rp18.032.455.800,00	100 %

Sumber : CALK Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

A. Isu Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah sehingga menimbulkan kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah yang telah dikembangkan.
4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, valid, dan mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan/perumusan kebijakan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi Dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Adapun visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

Arti dan makna yang dimaksud adalah:

- **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
- **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
- **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan tatapemerintahan yang baik (*good governance*).
- **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
- **Efisien dan Cepat** dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan *e-Government* (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- **Teknologi** dimaknai dengan penerapantata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi diatas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut :

Tabel 5
Misi Tahun 2017 – 2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	MISI
----	------

1.	Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2.	Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.
3.	Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
4.	Meningkatkan kesehatan masyarakat.
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.
6.	Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Misi Pertama meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Pembangunan ekonomi* adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. *Berbasis potensi daerah* adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Infrastruktur* adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. *Konektivitas daerah* adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Sumber daya manusia* adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Unggul dan handal* adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Kesehatan Masyarakat* adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. *Pembangunan demokrasi* adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Pengendalian bencana* adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai

dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. *Kualitas lingkungan hidup* adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bappeda, maka Bappeda secara khusus mendukung misi ke-5 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”**.

II.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda.

Berdasarkan penjelasan atas keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan jangka menengah Bappeda yang ingin diwujudkan pada tahun 2022 adalah: **“Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik”** dan **“Evaluasi Kinerja Baik”**. Tujuan ini dirumuskan, erat kaitannya dengan dukungan Bappeda dalam mencapai indikator sasaran pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Provinsi meningkat di dalam RPJMD.

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”.	Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)
	Evaluasi kinerja Baik	Predikat capaian kinerja hasil	Meningkatnya kualitas pengendalian dan	Persentase capaian sasaran

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi	evaluasi perencanaan pembangunan daerah	pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 7 Berikut:

Tabel 7
Target capaian Sasaran Kinerja Bappeda 2017-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			I	II	III	IV	V
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			I	II	III	IV	V
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	80%	80%	90%	95%	95%
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	80%	90%	85%	85%	85%
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	75%	80%	80%	85%	90%

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2017 – 2022 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2017 – 2022 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga perencanaan daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 8
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi : *"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"*

Misi Ke 5 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi"

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik	1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	1.1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas PD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan	1.1.1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku
			1.1.2. Optimalisasi dan pengembangan e-planning dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
			1.1.3. Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
		1.2. Menyusun rumusan kebijakan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan	1.2.1. Melaksanakan penelitian yang sesuai dengan prioritas daerah
			1.2.2. Mengembangkan sistem inovasi daerah
			1.2.3. Melakukan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan
	2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1.3. Mengembangkan sistem informasi data untuk publik	1.3.1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dan publik dalam mengakses data dan informasi pembangunan yang valid
		2.1. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan kualitas pelaporan kinerja PD	2.1.1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan PD, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana PD
			2.1.2. Penyusunan kajian/studi yang

Misi Ke 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			mendukung perencanaan lintas sektor
Evaluasi kinerja Baik	3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah	3.1. Menempatkan hasil pengendalian sebagai rumusan perencanaan selanjutnya	3.1.1. Meningkatkan ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan laporan-laporan sesuai aturan dengan tepat waktu. 3.1.2. Optimalisasi dan pengembangan e-dalev dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
	4. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	4.1. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pelaporan kinerja PD	4.1.1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan PD, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana PD

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari non urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian. Pejelasan program tersebut adalah :

A) Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B) FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 - c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- C) FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
 - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi;

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2021 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merencanakan target kinerja tahun 2021. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	830.373.708 723.197.708 107.176.000
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	95%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	698.081.644 549.550.000 81.564.531 66.967.113
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	394.514.251 71.456.750 242.035.400 40.410.000 40.612.101
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	85%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	809.326.719 809.326.719

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	85%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	129.343.209,00 41.630.000 55.831.996 31.881.213

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

II.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA). Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPEDA tahun 2021:

Tabel 10
Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100 %
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	95 %
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	85 %

No	Sasaran	Indikator	Target
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	85 %

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

II.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II
Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis BAPPEDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Sasaran	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Rp 830.373.708	4,74
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 1.092.595.895	6,24
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Rp 809.326.719	4,62
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Rp 129.343.209	0,74
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah oleh Bappeda	Rp 14.640.951.269	83,65

Sumber : CALK Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 12

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

∞ Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, (diolah)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 13 berikut:

Tabel 13

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	%	100	100	100	Sangat Baik

2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	%	95	100	105,26	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	%	85	92,59	108,9	Sangat Baik
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	%	85	90,99	107,05	Sangat Baik

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan uraian pada Tabel 13 diatas, maka rangkuman hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 14 Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja				
No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	1	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1	105,26	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1	108,9	Sangat Baik

4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	1	107,05	Sangat Baik
---	--	---	--------	-------------

Pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: "Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan".

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD. Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan dengan indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat sangat baik.

Tabel 15
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020 %	2021			Target Akhir Renstra 2022 %
			Target %	Realisasi %	% Capaian	
1	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Indikator 1 : Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD adalah sebagai berikut :

Jumlah program dalam RKPD Tahun 2021	
total jumlah program pada tahun rencana (2021) yang sesuai dalam RPJMD yang dilaksanakan/ditindaklanjuti	x 100 %

$$\frac{433}{433} \times 100 \% = 100 \%$$

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-1 pada tahun 2021 sesuai dengan target sebesar 100%.

Kesesuaian antara muatan RKPD dengan target/sasaran dalam RPJMD diukur berdasarkan Jumlah program dalam RKPD dibandingkan dengan total jumlah program pada tahun rencana yang sesuai dalam RPJMD yang dilaksanakan/ditindaklanjuti. Adapun persandingan Jumlah program dalam RKPD dengan Total Program dalam RPJMD berdasarkan prioritas daerah tahun 2021.

Berikut ini adalah hasil pengukuran capaian sasaran kinerja pada tahun 2021;

Tabel 16

Sandingan Program RKPD Tahun 2021 dengan Program RPJMD

NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	√	√
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	√	√
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
20	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
24	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
26	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
30	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
40	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
42	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
44	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
46	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
48	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
50	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
54	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
60	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
62	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
63	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
65	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
67	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
69	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
71	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
73	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
75	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
77	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
79	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
80	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.	√	√
81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
82	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
84	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
86	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
88	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
90	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
92	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
93	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
94	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
95	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
97	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
99	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
101	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
103	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
105	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
107	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
109	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
111	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
114	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
115	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
117	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
119	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
121	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
123	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
125	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
126	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
127	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
129	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
131	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
132	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
133	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
135	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
137	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
139	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
141	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
142	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
143	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
145	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
147	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
148	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
149	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
151	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
153	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
154	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
155	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
156	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
157	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
159	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
161	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
163	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
164	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
165	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√

NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
166	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
167	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
169	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
171	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
172	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
173	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
175	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
176	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
178	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
180	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
182	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
183	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
185	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
187	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
188	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
189	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√
190	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
191	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	√	√
192	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	√	√
193	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	√	√
194	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	√	√
195	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
196	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	√	√
197	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	√	√
198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
199	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	√	√
200	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	√	√
201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
202	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	√	√
203	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	√	√
204	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	√	√
205	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	√	√
206	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	√	√
207	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
208	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	√	√
209	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	√	√
210	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	√	√
211	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	√	√
212	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
213	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	√	√
214	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	√	√
215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
216	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	√	√
217	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	√	√
218	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√	√
219	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	√	√
220	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	√	√
221	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	√	√
222	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	√	√
223	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	√	√
224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
225	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√	√
226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
227	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√	√
228	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	√	√
229	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
230	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	√	√
231	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	√	√
232	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	√	√
233	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	√	√
234	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	√	√
235	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
236	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	√	√
237	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	√	√
238	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	√	√
239	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	√	√
240	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	√	√
241	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	√	√
242	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	√	√
243	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	√	√
244	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	√	√
245	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	√	√
246	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	√	√
247	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	√	√
248	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	√	√
249	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	√	√

NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
251	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	√	√
252	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	√	√
253	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	√	√
254	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	√	√
255	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	√	√
256	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	√	√
257	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	√	√
258	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	√	√
259	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	√	√
260	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
261	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	√	√
262	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
263	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
264	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	√	√
265	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
267	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	√	√
268	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
269	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	√	√
270	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
271	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN	√	√
272	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	√	√
273	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	√	√
274	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	√	√
275	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	√	√
276	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
277	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	√	√
278	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	√	√
279	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	√	√
280	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
281	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
282	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	√	√
283	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
284	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
285	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	√	√
286	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
287	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
288	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	√	√
289	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
290	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
291	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	√	√
292	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
293	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
294	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	√	√
295	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
296	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
297	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	√	√
298	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
299	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
300	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	√	√
301	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	√	√
302	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
303	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	√	√
304	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
305	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	√	√
306	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	√	√
307	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
308	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	√	√
309	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	√	√
310	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	√	√
311	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	√	√
312	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
313	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	√	√
314	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	√	√
315	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	√	√
316	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	√	√
317	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	√	√
318	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	√	√
319	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
320	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	√	√
321	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	√	√
322	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	√	√
323	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	√	√
324	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
325	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
326	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	√	√
327	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	√	√
328	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	√	√
329	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	√	√
330	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	√	√
331	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	√	√
332	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	√	√
333	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	√	√
334	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
335	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	√	√
336	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
337	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
338	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	√	√
339	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	√	√
340	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	√	√
341	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	√	√
342	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
343	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	√	√
344	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	√	√
345	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	√	√
346	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	√	√
347	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	√	√
348	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
349	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	√	√
350	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
351	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	√	√
352	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
353	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	√	√
354	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	√	√
355	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	√	√
356	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	√	√
357	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
358	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	√	√
359	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	√	√
360	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
361	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	√	√
362	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	√	√
363	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
364	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	√	√
365	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	√	√
366	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
367	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	√	√
368	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	√	√
369	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
370	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	√	√
371	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	√	√
372	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
373	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	√	√
374	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	√	√
375	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	√	√
376	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	√	√

NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
377	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	√	√
378	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	√	√
379	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	√	√
380	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	√	√
381	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	√	√
382	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
383	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	√	√
384	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	√	√
385	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
386	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	√	√
387	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	√	√
388	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	√	√
389	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	√	√
390	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
391	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	√	√
392	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	√	√
393	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	√	√
394	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	√	√
395	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
396	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
397	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	√	√
398	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
399	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	√	√
400	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	√	√
401	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	√	√
402	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
403	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	√	√
404	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	√	√
405	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√
406	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
407	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√
408	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
409	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√
410	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
411	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√
412	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
413	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√
414	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
415	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√
416	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
417	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√
418	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√

NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
419	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√
420	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
421	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	√	√
422	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√	√
423	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
424	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	√	√
425	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
426	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	√	√
427	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	√	√
428	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√
429	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	√	√
430	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	√	√
431	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	√	√
432	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	√	√
433	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	√	√

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan RKPD Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah program yang mendukung prioritas daerah dalam RPJMD telah selaras dengan program yang ada pada RKPD. Seluruh rencana kegiatan yang ada dalam RKPD diharapkan dapat mendukung terwujudnya pencapaian target/sasaran pembangunan daerah sebagaimana dimandatkan dalam RPJMD. Dalam melakukan reviu atas kesesuaian rancangan RKPD dengan target/sasaran dalam RPJMD juga dilakukan verifikasi secara bersamaan atas target/sasaran RPJMD yang harus dijabarkan dalam sasaran RKPD tiap tahunnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa antara RPJMD dengan RKPD telah memiliki integrasi dan sinergis secara konsisten. Dengan demikian, muatan RKPD harus mendukung pencapaian target/sasaran RPJMD.

Disamping itu pada tahun 2021 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai hasil yang sangat memuaskan di bidang dokumen perencanaan pembangunan. Anugerah tersebut merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD 2021 Penghargaan ini untuk keenam kalinya diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai nominasi terbaik tingkat nasional. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tahunan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran I adalah :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan penyusun dokumen perencanaan untuk mempedomani dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam menyusun dokumen RKPD.
- Keselarasan dan kesesuaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD maupun RKPD.

Potensi Hambatan

- Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD. Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJMD merupakan

pedoman perencanaan untuk lima tahunan. Sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Strategi Pemecahan

- Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk sasaran I yaitu Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan dengan target indikator sebesar 100% dialokasikan anggaran sebesar Rp830.373.708,00, dalam pencapaian kinerja sebesar 100% dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 48,08%.

Tabel 17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian indikator kinerja sasaran I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	% EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	830.373.708	431.104.508	399.269.200	48,08%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran I yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan

Sasaran II : “Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”.

Tolok ukur capaian sasaran ke-2 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat). Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 111% dengan predikat sangat baik.

Tabel 18
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS II

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020%	2021			Target Akhir Renstra 2022 %
			Target %	Realisasi %	% Capaian	
2	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	111	95	100	105,26	95

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang baik}}{\text{Total jumlah Renstra Perangkat Daerah}} \times 100 \%$$

$$\frac{34}{34} \times 100 \%$$

$$= 100$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-2 pada tahun 2021 telah melebihi target sebesar 10%, dari target yang ditetapkan sebesar 90% mampu direalisasikan sebesar 100%.

Berikut ini adalah hasil pengukuran capaian sasaran kinerja pada tahun 2020;

Tabel 19
Daftar Peringkat/kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020
Di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori	Interpretasi
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77,60	BB	Sangat Baik
2.	Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80,11	A	Memuaskan
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	79,34	BB	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori	Interpretasi
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81,75	A	Memuaskan
5.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79,12	BB	Sangat Baik
6.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76,88	BB	Sangat Baik
7.	Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	82,59	A	Memuaskan
8.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79,28	BB	Sangat Baik
9.	Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72,94	BB	Sangat Baik
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80,53	A	Memuaskan
11.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72,02	BB	Sangat Baik
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75,81	BB	Sangat Baik
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71,64	BB	Sangat Baik
14.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75,31	BB	Sangat Baik
15.	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79,28	BB	Sangat Baik
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77,07	BB	Sangat Baik
17.	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75,85	BB	Sangat Baik
18.	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79,68	BB	Sangat Baik
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	79,97	BB	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori	Interpretasi
	Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	85,31	A	Memuaskan
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78,18	BB	Sangat Baik
22.	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79,40	BB	Sangat Baik
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75,08	BB	Sangat Baik
24.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74,81	BB	Sangat Baik
25	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76,90	BB	Sangat Baik
26.	Dinas Sosial Provinsi kepulauan Bangka Belitung	78,74	BB	Sangat Baik
27.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung	77,34	BB	Sangat Baik
28.	Dinas Pendidikan Provinsi kepulauan Bangka Belitung	78,50	BB	Sangat Baik
29.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung	76,26	BB	Sangat Baik
30	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75,28	BB	Sangat Baik

Sumber: Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan:

1. AA = Nilai Angka >90-100 (sangat memuaskan)
2. A = Nilai Angka > 80-90 (Memuaskan)
3. BB = Nilai Angka > 70-80 (Sangat baik)
4. B = Nilai Angka > 60-70 (Baik)
5. CC = Nilai angka > 50-60 (Cukup memadai)
6. C = Nilai Angka > 30-50 (kurang)
7. D = Nilai Angka 0-30 (sangat kurang)

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 2 adalah :

- Adanya komitmen dari pimpinan dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah agar lebih baik

Potensi Hambatan

- Masih adanya kurang pemahaman dan ketidakpedulian ASN atas substantif dokumen perencanaan yang berkualitas.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kompetensi pimpinan dan seluruh perencana dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

Untuk sasaran II rincian yaitu Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target indikator sebesar 90% dialokasikan anggaran sebesar Rp1.092.595.895,00, dalam pencapaian kinerja sebesar 105,26% dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 53,68%.

Tabel 20

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian indikator kinerja sasaran II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	% EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	90%	105,26%	Total Program Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1. Penelitian dan	1.092.595.895	506.108.673	586.487.222	53,68

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	% EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan				
				2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				
				3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				
				4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi				

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran II yaitu sebagai berikut:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2. Program Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan :

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sasaran III : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Tolok ukur capaian sasaran ke-3 Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi. Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 108,9% dengan predikat Sangat Tinggi.

Tabel 21
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS III

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020%	2021		Target Akhir Renstra 2022 %
			Target %	Realisasi %	
3	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	100,22	85	92,59	108,9

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah capaian sasaran pembangunan daerah pada RKPD yang mencapai target}}{\text{Total sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD}} \times 100 \%$$

$$\frac{25}{27} \times 100 \%$$

$$= 92,59$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-3 pada tahun 2021 mampu direalisasikan sebesar 108,9% dari target capaian sebesar 85%, terealisasi sebesar 92,59%.

Ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD diukur berdasarkan jumlah capaian sasaran pembangunan daerah pada RKPD yang mencapai target dibandingkan dengan Total sasaran pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan indikator sasaran masing-masing. Berikut ini adalah hasil pengukuran capaian sasaran kinerja pada tahun 2021:

Tabel 22
Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2021

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian	4,86	6,71**	138,06	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	4,35	9,76*	224,36	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	21,05%	-0,18	-0,85	Kurang Berhasil

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatkan PDRB sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan Energi	1,76	6,93	507,38	Sangat Berhasil
5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	1,5	7,80	520	Sangat Berhasil
6	Menurunkan tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,5	5,03	109,34	Sangat Berhasil
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64	47,84	74,75	Cukup berhasil
8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,5%	4,90%	112,24	Sangat Berhasil
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.409.026	Rpl.332.736	94	Berhasil
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	86	61,2	71,16	Cukup Berhasil
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	25	0	0	Kurang Berhasil
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	69,45%	57,14	82,27	Berhasil
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,32	12,17	98,78	Berhasil
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	49,25	46,8	95,02	Berhasil
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,1	65,82*	96,65	Berhasil
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08	1,84*	113,04	Sangat Berhasil
17	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,25	89,02**	99,74	Berhasil
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	54%	53,67	99,38	Berhasil
19	Meningkatkan Pembangunan	Indeks Pembangunan Olah	0,3	36,67	12.223	Sangat

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
	Olah Raga	Raga				Berhasil
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	65,92 %	92,22 %	139,89	Sangat Berhasil
21	Meningkat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	85,92%	87,03	101,29	Sangat Berhasil
22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	70	66,08*	94,4	Berhasil
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan Sipil	87,82	79,15	90,12	Berhasil
24	Meningkatkan Hak-hak politik	Nilai Hak-hak Politik	81,85	66,2	80,87	Berhasil
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,56	92,97	115,40	Sangat Berhasil
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,3	0,34	113	Sangat Berhasil
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,74	72,05	95,12	Berhasil

Sumber : * data tahun 2020/2021, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 3 adalah :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan masing-masing koordinator terhadap pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan

Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan.
- Masih adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD.
- Adanya kondisi penyebaran virus covid 19 yang menghambat berbagai pencapaian kinerja program/kegiatan.

Strategi Pemecahan

- Melakukan monitoring dalam pelaksanaan program/kegiatan terhadap target indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- Melakukan stimulus dan inovasi untuk pencapaian program kegiatan yang terdampak dari kondisi covid 19.

Untuk sasaran III yaitu Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan target indikator sebesar 85% dialokasikan anggaran sebesar Rp809.326.719,00, dalam pencapaian kinerja sebesar 108,9% dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 83,84%.

Tabel 13

Efisiensi Peggunaan Sumber Daya
Pencapaian indikator kinerja sasaran III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	% EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	85%	108,9%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	809.326.719,00	130.748.603,00	678.578.116,00	83,84%
				Kegiatan :				
				1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah				

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran III yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Sasaran IV : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran ke-4 Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 107,05% dengan predikat sangat baik.

Tabel 23

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS IV

No	Indikator Kinerja	Capaian	2021	Target Akhir
----	-------------------	---------	------	--------------

		2020%	Target %	Realisasi %	% Capaian	Renstra 2022 %
4	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	105,34	85	90,99	107,05	90

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\text{Jumlah capaian program pada Renstra yang mencapai target}}{\text{Jumlah total program pada RPJMD}} \times 100 \% \\
 \frac{394}{433} \times 100 \% \\
 = 90,99
 \end{array}$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-4 pada tahun 2020 telah melebihi target sebesar 4,3%, dari target yang ditetapkan sebesar 80% mampu direalisasikan sebesar 84,3%.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran IV adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan
- Keselarasan dan kesesuaian tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD

Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah ditetapkan.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
- Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.

Untuk sasaran IV yaitu Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah dengan target indikator sebesar 85% dialokasikan anggaran sebesar Rp129.343.209,00, dalam pencapaian kinerja sebesar 107,05% terdapat efisiensi anggaran sebesar 19,88%.

Tabel 24

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian indikator kinerja sasaran IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	% EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	85%	107,05%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u>	129.343.209	103.622.332	25.720.877	19,88
				1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran IV yaitu sebagai berikut:

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

Kegiatan :

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar 86,62% dari total anggaran yang dialokasikan, Realisasi anggaran untuk program/kegiatan fungsi penunjang sebesar 40,94% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan non urusan sebesar 95,54%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-4 sebesar 80,11%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-3 yaitu Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 16,16%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran 86,62% dengan menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 mencukupi dengan memperhatikan kondisi dampak dari covid 19.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 25 berikut:

TABEL 25 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER SASARAN TAHUN 2021							
No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	100	100	100	830.373.708	431.104.508	51,92%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	90	100	111	1.092.595.895	506.108.673	46,32%
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	85	92,59	108,9	809.326.719,00	130.748.603,00	16,16%
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	85	90,99	107,05	129.343.209	103.622.332	80,11%

Jumlah	2.861.639.531,00	1.171.584.116,00	
Belanja Non Urusan	14.640.951.269,00	13.988.739.277,00	
Total Belanja	17.502.590.800	15.160.323.393	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Bappeda bervariasi antara rendah hingga baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan; faktor pengambilan keputusan memanfaatkan momen perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

3. Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja T.A 2020

Hasil evaluasi dari Inspektorat, Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 85,31 dengan interpretasi predikat A, perlu sedikit perbaikan.

1. Rekomendasi Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2020

1. Perlu adanya peningkatan monitoring atas capaian rencana aksi kinerja secara berkala (bulanan, triwulanan, tahunan);
2. Perlu adanya peningkatan Rencana aksi untuk dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
3. Pemantauan Rencana Aksi hendaknya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
4. Laporan atas hasil evaluasi program dan Rencana Aksi hendaknya dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan;
5. Laporan atas hasil evaluasi Rencana Kerja hendaknya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

2. Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan pelaksanaan monitoring rencana aksi kinerja secara berkala;
- b. Mengupayakan peningkatan Rencana aksi untuk dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan ;
- c. Mengupayakan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap rencana aksi secara optimal.
- d. Mengupayakan tindak lanjut dari hasil evaluasi program dan rencana aksi sebagai perbaikan.
- e. Mengupayakan langkah-langkah nyata untuk menindaklanjuti hasil evaluasi rencana kerja,

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021, serta Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (Empat) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (empat) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana
2. Hasil analisis 4 (empat) indikator sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD, Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat), Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi, Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi telah melampaui target yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional peneliti dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait dengan penyusunan dokumen kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang
Tel: (0717) 439335, Fax: (0717) 439336